



**BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa menara telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara dalam rangka perluasan cakupan jangkauan sinyal dan kapasitas;
- b. bahwa dalam rangka keamanan dan keselamatan masyarakat serta menjaga keselamatan lingkungan, maka perlu dilakukan penataan;
- c. bahwa untuk mencapai terwujudnya efektifitas, efisiensi dan estetika kota dalam pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, serta meningkatkan kehandalan, cakupan pelayanan telekomunikasi dan kebutuhan menara telekomunikasi perlu menyeimbangkan jumlah serta prioritas penggunaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Sumbawa Barat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara republic

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memeori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang

- Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi Nomor: 18 Tahun 2009 Nomor: 07/PRT/M/2009 Nomor: 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 Nomor: 3/P/2009;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN
n PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN
SUMBAWA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
4. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
5. Lembaga Teknis Daerah adalah lembaga teknis yang diberi kewenangan dibidang penataan dan pembangunan menara telekomunikasi.
6. Dinas Daerah adalah Dinas yang diberi kewenangan di bidang penataan dan pembanguna telekomunikasi.
7. Dinas Perhubungan, Komunikaasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah Daerah yang modalnya sebagian besar/seluruhnya adalah milik pemerintah daerah.
9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optic, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
10. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
11. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara.
12. Pengelola Menara Telekomunikasi adalah Badan Usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
13. Kontraktor Menara Telekomunikasi adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan professional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara serta mampu menyelenggarakan kegiatannya dalam mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.

14. Menara telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
15. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang dapat digunakan oleh lebih dari 1 (1) operator.
16. Menara Telekomunikasi Tunggal adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
17. Menara Telekomunikasi Rangka adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
18. Menara Kamufase adalah penyesuaian desain bentuk menara telekomunikasi yang diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
19. Menara Telekomunikasi Green Fiel (GF) adalah menara telekomunikasi yang didirikan diatas tanah.
20. Menara Telekomunikasi Rof Top (RT) adalah menara telekomunikasi yang didirikan diatas bangunan.
21. Transmisi Utama (Backbone) adalah jaringan telekomunikasi utama yang berfungsi sebagai janrangan penghubung utama.
22. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, pemutihan, mengubah, memperluas atau mengurangi bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administrative dan persyaratan teknis yang berlaku.
23. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
24. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
25. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
26. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara disekitar

Bandar Udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

27. Operator adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menyelenggarakan telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat Izin untuk melakukan kegiatannya.
28. Penyedia Menara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau badan Usaha Milik Swasta yang membangun, memiliki, menyediakan, menyewakan atau mengelola menara telekomunikasi bersama menara telekomunikasi tunggal.
29. Base Transceiver Station, yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat mobile untuk melayani wilayah cakupan (Sel).
30. Rumah Otomasi adalah perangkat infrastruktur telekomunikasi yang merupakan pusat akses control dengan pengamanan dilengkapi media server secara terpusat.
31. Barang Milik Daerah adalah semua kekayaan atau asset pemerintah daerah, baik yang dimiliki maupun yang dikuasai berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang menyatakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung diukur atau ditimbang.
32. Microcell adalah sub sistem Base Transceiver Station yang memiliki cakupan layanan (coverage) dengan area/radius lebih kecil yang tidak terjangkau oleh Base Transceiver Station utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat lalu lintasnya.
33. Serat optic adalah sejenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.

BAB II

RUANG LINGKUP PRINSIP PENYELENGGARAAN MENARA

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan, penataan, perizinan dan pengendalian penyelenggaraan menara telekomunikasi di Kabupaten Sumbawa Barat.

Pasal 3

Penyelenggaraan menara telekomunikasi didasarkan pada prinsip-prinsip :

- a. Pemanfaatan ruang dalam wilayah yang terbatas harus memberikan kinerja cakupan layanan telekomunikasi yang baik, didukung ketersediaan jaringan

serat optic, rumah otomasi dan menara secara efisien dengan resiko yang minimal;

- b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk infrastruktur dalam penyelenggara telekomunikasi harus digunakan seoptimal mungkin dan efisien, baik pemilihan teknologi, penggunaan menara maupun desain jaringannya.

BAB III

PENGATURAN DAN PENATAAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Pengaturan Infrastruktur Telekomunikasi

Pasal 4

- (1) Pengaturan dan penataan infrastruktur telekomunikasi meliputi pembangunan rumah otomasi, pengembangan jaringan dan serat optic, penempatan menara telekomunikasi.
- (2) Rumah otomasi merupakan infrastruktur yang mengendalikan akses control dilengkapi dengan modul pengendalian dan media server yang bersifat terpusat serta memiliki kehandalan untuk mengakomodasi perubahan desain akibat perkembangan teknologi.
- (3) Menara telekomunikasi terdiri atas menara telekomunikasi handover yang utama dan langsung kepusat otomasi dan menara pendukung lainnya seperti menara bersama dan menara microcell ditiang-tiang penerangan jalan umum dan bangunan (Roof Top).
- (4) Jaringan serat optic merupakan penghubung antara rumah otomasi, menara handover dan menara pendukung serta menara microcell tiang penerangan Jalan Umum dan bangunan (Roof Top).

Paragraph 1

Penempatan Menara Telekomunikasi

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pengaturan dan penataan penempatan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat, rencana penempatan dan persebaran menara telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan struktur tata ruang dan pola pemanfaatan ruang serta ketersediaan ruang wilayah yang ada.
- (2) Kepadatan/populasi pemakai jasa telekomunikasi disesuaikan dengan kaidah penataan ruang wilayah atau harus memperhatikan potensi ruang kota yang tersedia, kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi, KKOP yang disesuaikan dengan kaidah penataan ruang kota/estetika, keamanan,

ketertiban, keselarasan lingkungan serta kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.

- (3) Penempatan lokasi menara harus mempertimbangkan dan memperhatikan aspek-aspek teknis dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan prinsip-prinsip penggunaan menara secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
- (4) Rencana penempatan dan persebaran menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan telekomunikasi dapat memanfaatkan infrastruktur lain untuk menempatkan antenna dengan tetap memperhatikan estetika arsitektur dan keserasian dengan lingkungan sekitar.
- (2) Atap bangunan yang berupa plat beton setelah melalui kajian teknis dinyatakan kuat dengan penguatan struktur diperkenankan untuk mendirikan menara Roof Top (RT) dengan melampirkan hasil perhitungan/kajian teknis mengenai perkuatan struktur.

Pasal 7

- (1) Untuk mereduksi tegakan menara yang tinggi, penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan bagian atas bangunan gedung bertingkat yang berupa plat beton dengan penambahan konstruksi bangunan berupa tiang (pole) dengan tinggi maksimal 6 (enam) meter selama masih memenuhi standar KKOP dan/atau tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antenna dan perangkat.
- (2) Antenna yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antenna.
- (3) Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang lokasi antenanya berada pada jalan arteri atau kolektor harus dikamuflase dan wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Persebaran Menara Telekomunikasi

Pasal 8

- (1) Menara yang dibangun harus sesuai dengan pola peletakan dan persebaran dengan mempertimbangkan aspek penataan ruang wilayah.
- (2) Persebaran menara yang terimplementasikan dalam notasi jarak antar menara yang digunakan para penyelenggara telekomunikasi harus mempertimbangkan kesinambungan suatu jangrangan telekomunikasi serta aspek teknis dari teknologi yang digunakan oleh masing-masing penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Persebaran menara telekomunikasi dibagi dalam zona-zona dengan memperhatikan potensi ruang kota yang tersedia serta kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dan disesuaikan dengan kaidah penataan ruang kota, keamanan, ketertiban, lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.

Pasal 9

Menara telekomunikasi terbagi dalam zona-zona yang terletak dalam kawasan yang disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.

Paragraph 3

Pembagian Zona Telekomunikasi

Pasal 10

- (1) Zona penetapan lokasi menara ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Kepadatan penduduk;
 - b. Kerapatan bangunan;
 - c. Jumlah sarana dan prasarana pemerintahan/perdagangan/jasa;
 - d. Letak strategis wilayah; dan
 - e. Larangan penempatan sarana dan prasarana telekomunikasi pada instansi militer.
- (2) Pembagian zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Zona I, dengan ketentuan :
 1. Kepadatan penduduk tinggi;
 2. Kerapatan bangunan tinggi;
 3. Sarana dan prasarana pemerintah/perdagangan/jasa sangat memadai;

4. Terdapat akses jalan arteri dan ring road.
- b. Zona II, dengan ketentuan :
1. Kepadatan penduduk sedang;
 2. Kerapatan bangunan sedang;
 3. Prasarana dan sarana pemerintah/perdagangan/jasa sedang;
 4. Terdapat akses jalan kolektor.
- c. Zona III, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Kepadatan penduduk rendah;
 2. Kepadatan bangunan rendah;
 3. Sarana dan prasarana pemerintah/perdagangan/jasa tidak memadai;
 4. Tidak terdapat akses langsung dengan jalan arteri, ring road dan kolektor.
- (3) Ketentuan mengenai pembagian zona sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 11

Ketentuan ketinggian dan jarak menara telekomunikasi pada zona sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ditentukan lebih lanjut melalui kajian teknis lembaga teknis daerah dengan memperhatikan ketinggian yang diizinkan dari batas aman KKOP.

Pasal 12

Dalam upaya meminimalisirkan jumlah menara telekomunikasi, para operator yang mengajukan pembangunan menara telekomunikasi baru, diwajibkan menyediakan konstruksi menara telekomunikasi yang memenuhi syarat untuk dijadikan menara telekomunikasi bersama.

Pasal 13

- (1) Menara telekomunikasi yang telah ada dan secara teknis memungkinkan harus digunakan secara bersama-sama oleh lebih dari 1 (satu) operator atau dijadikan menara telekomunikasi bersama.
- (2) Penentuan kelayakan menara telekomunikasi yang dapat digunakan harus melalui kajian teknis dari tim yang ditunjuk oleh lembaga teknis daerah sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Dalam hal kebutuhan antenna telekomunikasi baru pada kawasan tertentu merupakan keharusan yang tidak dapat dihindari, demi menjaga estetika

kota dan mengurangi beban pada menara yang telah ada pada daerah padat pelanggan, maka penyelenggara telekomunikasi harus menggunakan perangkat microcell dan/atau perangkat radio link yang disubstitusi atau diganti dengan menggunakan serat optic.

- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan telekomunikasi yang menggunakan perangkat microcell dan/atau perangkat radio link yang disubstitusi atau diganti dengan menggunakan serat optic sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pemasangan perangkat microcell tipe out door pada bangunan gedung dan sarana milik Pemerintah Kabupaten seperti pada Penerangan Jalan Umum, Billboard, Jembatan Penyeberangan Orang dan sebagainya harus memperoleh persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penempatan perangkat microcell dan serat optic sebagai pengganti radio link pada sistem telekomunikasi wajib memperhatikan aspek estetika serta keserasian dengan lingkungan.

Pasal 16

- (1) Penggunaan serat optic yang ditanam maupun melalui saluran udara, apabila memanfaatkan lahan milik Pemerintah Kabupaten, baik sebagian maupun seluruhnya harus memperoleh Izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Lahan milik Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pemasangan serat optic antara lain ruang milik jalan baik berupa bahu jalan maupun median jalan.

Pasal 17

Menara telekomunikasi bersama yang dibangun dengan memanfaatkan barang milik daerah, maka pemanfaatan barang milik daerah tersebut didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan menara bersama yang memanfaatkan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dapat dilakukan oleh Dinas atau Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Dinas atau BUMD yang ditetapkan Bupati sebagai penyedia menara bersama harus membuat kajian kebutuhan menara sesuai dengan

permintaan operator atau penyelenggara telekomunikasi yang meliputi kajian teknis kebutuhan cakupan, titik-titik lokasi (koordinat) dengan berpedoman kepada rencana pola persebaran menara, rancangan bangunan menara, alternative penempatan antenna dan kajian terhadap perencanaan bisnis dengan melibatkan pemangku kepentingan.

- (3) Hasil kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Teknis untuk ditetapkan sebagai acuan penempatan lokasi menara.

Bagian Kedua

Desain dan Konstruksi Menara

Pasal 19

- (1) Menara diklasifikasikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu :
- Menara tunggal (monopole);
 - Menara rangka (self supporting);
 - Menara tunggal berupa rangka maupun tiang dengan angkur kawat sebagai penguat konstruksi (guyed mast).
- (2) Desain dan konstruksi dari 3 (tiga) bentuk menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi tanah.
- (3) Pondasi menara harus sesuai dengan tipe tanah dan peletakannya.
- (4) Selain ketiga bentuk menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimungkinkan untuk digunakan jenis menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan dan efisiensi.

Pasal 20

- (1) Setiap pembangunan menara telekomunikasi yang digunakan sebagai menara telekomunikasi bersama berupa menara telekomunikasi yang dapat digunakan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) operator dan desain konstruksi menaranya harus mendapatkan persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Struktur menara yang dibangun harus memenuhi Standar Nasional Indonesia dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan factor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Standar baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah tempat penempatan antenna dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama, ketinggian menara, struktur menara, rangka struktur menara, pondasi menara dan kekuatan angin.

- (4) Pembangunan menara telekomunikasi di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu seperti kawasan Bandar udara/pelabuhan, kawasan cagar budaya, kawasan pariwisata, kawasan hutan lindung /hutan kota, kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi dan kawasan pengendalian ketat lainnya wajib memenuhi ketentuan Perundang-Undangan.
- (5) Menara telekomunikasi yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
- (6) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari :
- a. Pertanahan (grounding);
 - b. Penangkal petir;
 - c. Catu daya;
 - d. Lampu halangan penerbangan (aviation obstruction light);
 - e. Marka halangan penerbangan (aviation obstruction marking); dan
 - f. Pagar pengaman.
- (7) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari :
- a. Nama pemilik menara;
 - b. Lokasi dan koordinat menara;
 - c. Tinggi menara;
 - d. Tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - e. Penyedia jasa konstruksi;
 - f. Beban maksimum menara; dan
 - g. Nomor dan tanggal izin Mendirikan Bangunan.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Menara
Paragraph 1
Syarat Keselamatan

Pasal 21

Untuk menjamin keselamatan penduduk serta bangunan sekitarnya, maka menara telekomunikasi wajib memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Pada KKOP ketinggian maksimum menara telekomunikasi termasuk penangkal petirnya harus sesuai dengan aturan zona KKOP yang berlaku pada Bandar Udara Kabupaten Sumbawa Barat;
- b. Radius jaminan keamanan menara telekomunikasi adalah setinggi menara telekomunikasi tersebut;

- c. Setiap operator wajib memberikan jaminan keselamatan penduduk serta bangunan disekitarnya dari dampak negative dan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang disepakati oleh para pihak;
- d. Rencana pembangunan, konstruksi dan material menara harus memenuhi standard an peraturan yang berlaku;
- e. Konstruksi bangunan menara yang berdiri diatas bangunan harus memenuhi syarat-syarat kemampuan beban dari menara dan beban-beban laninnya;
- f. Surat jaminan asuransi penyelenggara menara telekomunikasi.

Pasal 22

- (1) Setiap menara telekomunikasi yang dibangun wajib diasuransikan oleh pemiliknya.
- (2) Pemilik menara telekomunikasi wajib bertanggung jawab terhadap setiap kecelakaan yang timbul akibat dibangunnya menara telekomunikasi.

Pasal 23

- (1) Pemilik menara wajib melaporkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk secara berkala 1 (satu) kali setiap tahun.
- (2) Tata cara pelaporan kelaikan fungsi bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

Paragraph 2

Syarat Keamanan Menara

Pasal 24

- (1) Menara yang berdiri diatas tanah beserta bangunan penunjangnya harus dilindungi dengan pagar.
- (2) Ketentuan mengenai pagar atau bangunan-bangunan perlindungan lainnya mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraph 3

Syarat Keamanan Menara

Pasal 25

Untuk menjamin kemanfaatan menara, maka:

- a. Tinggi menara harus disesuaikan dengan penyelenggaraan telekomunikasi untuk meningkatkan cakupan layanan, kapasitas maupun kualitas dan tetap memperhatikan keserasian dengan lingkungan sekitar.
- b. Jarak minimum antar BTS disesuaikan dengan aspek teknis dari teknologi telekomunikasi yang digunakan oleh masing-masing penyelenggaraan telekomunikasi.

Paragraph 4

Syarat Keserasian/Keindahan Menara

Pasal 26

Untuk menjamin keserasian menara dengan bangunan dan lingkungan di sekitarnya maka desai menara harus memperhatikan estetika tampilan dan arsitektur yang serasi dengan lingkungan.

Bagian Keempat

Menara Telekomunikasi Bersama

Pasal 27

- (1) Dalam upaya penataan menara telekomunikasi, pembangunan menara telekomunikasi diarahkan kepada pembangunan dan pengembangan menara telekomunikasi bersama.
- (2) Para operator dan penyedia menara telekomunikasi yang mengajukan pembangunan menara telekomunikasi baru diharuskan menyiapkan konstruksi menara telekomunikasi yang memenuhi syarat untuk dijadikan menara telekomunikasi bersama.
- (3) Konstruksi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19.

Pasal 28

Menara telekomunikasi yang telah berdiri setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini dan sesuai dengan rencana penempatan dan persebaran menara telekomunikasi serta secara teknis memungkinkan harus digunakan secara bersama-sama oleh lebih dari 1 (satu) operator dan dijadikan menara telekomunikasi bersama.

Pasal 29

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pembangunan menara telekomunikasi bersama yang

menggunakan/memanfaatkan asset dalam penguasaan Pemerintah Daerah atau aset Daerah dengan memperhatikan prinsip larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 30

- (1) Penyedia menara telekomunikasi bersama harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada seluruh operator dalam menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan konstruksi teknis menara.
- (2) Penyedia menara telekomunikasi bersama wajib melakukan pengaturan untuk menghindari terjadinya interferensi yang merugikan operator dalam penggunaan menara telekomunikasi bersama.
- (3) Penyedia menara telkomunikasi bersama dalam pengoperasiannya wajib mematuhi prinsip-prinsip penggunaan menara telekomunikasi bersama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Ketentuan penggunaan menara bersama hanya berlaku untuk menara yang berfungsi sebagai BTS.
- (5) Penyelenggara menara telekomunikasi atau penyedia menara yang memiliki menara yang digunakan sebagai BTS atau pengelola menara BTS harus memberikan kesempatan yang sama kepada penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara miliknya secara bersama sebagai menara BTS sesuai kemampuan teknis menara miliknya.
- (6) Penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan menara yang telah berdiri dan memiliki IMB seperti menara televise, radio siaran dan lainnya untuk penempatan antenna fungsi BTS sesuai kemampuan teknis menara.
- (7) Penyelenggara telekomunikasi wajib menyampaikan rencana penempatan antenna/menara (cell planning) untuk BTS kepada pemerintah Daerah untuk disesuaikan dengan Rencana Teknis Ruang Kabupaten.
- (8) Penempatan antenna untuk fungsi BTS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus memiliki izin sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 31

Rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi bersama pada rencana penempatan dan persebaran menara, ditawarkan secara terbuka kepada

penyedia menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 32

- (1) Setiap pembangunan menara telekomunikasi maupun microcell dan jaringan serat optic sebagai pengganti radio link pada sistem telekomunikasi wajib memiliki IMB.
- (2) Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan tentang penataan ruang.
- (3) Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakanj melalui pelayanan terpadu.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 33

- (1) Kegiatan pengawasan penyelenggaraan menara telekomunikasi diselenggarakan dalam bentuk pelaporan pemantauan dan evaluasi terhadap penerbitan perizinan serta pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan menara oleh penyedia menara telekomunikasi.
- (2) Pengendalian penyelenggaraan menara telekomunikasi meliputi penerbitan pembangunan dan pemeliharaan menara telekomunikasi serta penyelenggaraan menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang penataan dan pembangunan menara

telekomunikasi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

(2)Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana bidang penataan dan pembangunan menara telekomunikasi;
- b. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana bidang penataan dan pembangunan menara telekomunikasi;
- c. Memanggil orang untuk mendengar dan diperiksa sebagi saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana bidang penataan dan pembangunan menara telekomunikasi;
- d. Menyegel dan/atau menyita barang dan alat-alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana bidang penataan dan pembangunan menara telekomunikasi;
- e. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana penataan dan pembangunan menara telekomunikasi;
- f. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- g. Melakukan penghentian penyidikan; dan
- h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum.

(3)Pejabat Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat surat perintah dari Sekretaris Daerah atau Pelaksana Tugas harian atau atasan langsung Pejabat Pegawai Negeri Sipil serta dapat berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

(1)Setiap penyelenggara menara telekomunikasi yang membangun menara telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan teknis bangunan yang telah ditetapkan, sehingga mengakibatkan menara telekomunikasi tidak dapat berfungsi dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Dalam kurun waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Tahun setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka menara telekomunikasi yang berdiri dan memiliki Izin tetapi penggunaannya hanya 1 (satu) operator wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 20 Oktober 2017
BUPATI SUMBAWA BARAT,

dto

W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 20 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

dto

A. AZIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT 69

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

I. UMUM

Seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan komunikasi nirkabel (*seluler*) masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat saat ini banyak bangunan menara didirikan oleh operator telekomunikasi. Keberadaan menara (*tower*) tersebut merupakan sarana pendukung di daerah mengalami pertumbuhan yang semakin pesat. Banyaknya menara tersebut di satu sisi menguntungkan warga karena memperlancar arus komunikasi. Di sisi lain, menara komunikasi juga dapat membahayakan keselamatan penduduk sekitar menara jika menara tersebut mengabaikan prinsip-prinsip keamanan, keselamatan dan estetika, sehingga perlu untuk ditata dan dikendalikan. Saat ini belum ada aturan yang mengikat untuk mengatur, menata, dan mengendalikan keberadaan serta pembangunan menara di Kabupaten Sumbawa Barat. Padahal faktor keselamatan, keamanan, kemanfaatan, keindahan dan keserasian dengan bangunan dan lingkungan sekitarnya perlu menjadi pertimbangan yang harus diutamakan. Untuk maksud tersebut maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Sumbawa Barat. Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Sumbawa Barat merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang menjadi pedoman bagi daerah dalam kebijakan penataan, pengawasan dan pengendalian menara di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 6